



---

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Sumatera Utara

Kanina Kharomah Sinaga<sup>1</sup>, Al Bina<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Asahan

[hanisaaja829@gmail.com](mailto:hanisaaja829@gmail.com)

### Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara periode 2020-2024. Penelitian menggunakan data panel 33 kabupaten/kota dengan metode regresi data panel dan model Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Namun, secara parsial ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan. Nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,994023 menunjukkan bahwa 99,40% variasi ketimpangan wilayah dapat dijelaskan oleh variabel penelitian. Kesimpulannya, PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama memengaruhi ketimpangan wilayah, tetapi belum memberikan pengaruh yang signifikan secara individu. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan fiskal daerah yang lebih efektif untuk mendukung pemerataan pembangunan di Sumatera Utara.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Ketimpangan Wilayah.

### 1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi daerah pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah. Pemerataan pembangunan menjadi isu penting karena keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat. Namun, dalam praktiknya proses pembangunan sering kali menimbulkan ketimpangan antar wilayah, baik dari sisi pendapatan, aktivitas ekonomi, maupun kualitas hidup masyarakat. Ketimpangan wilayah tersebut umumnya tercermin dari perbedaan tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita serta jumlah penduduk antar daerah dalam satu wilayah administratif.

Dalam konteks nasional, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah yang diikuti dengan desentralisasi fiskal sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintah serta sumber-sumber keuangan daerahnya. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah secara lebih merata.

Menurut Mardiasmo (2018;20), desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah serta mengurangi ketimpangan antar wilayah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut, pemerintah pusat menyalurkan berbagai sumber pendanaan kepada daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer ke daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan demikian, keberadaan PAD, DAU, dan DAK diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah.

Pendapatan asli daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Daerah dengan tingkat pendapatan asli daerah yang tinggi umumnya memiliki aktivitas ekonomi yang lebih berkembang sehingga mampu membiayai pembangunan secara mandiri. Sebaliknya, daerah dengan pendapatan asli daerah yang rendah cenderung memiliki keterbatasan fiskal dan bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Perbedaan kemampuan fiskal antar daerah inilah yang berpotensi memperlebar ketimpangan pembangunan wilayah.

Selain pendapatan asli daerah, pemerintah pusat menyalurkan dana alokasi umum yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Dana alokasi umum diharapkan dapat menciptakan pemerataan kemampuan keuangan sehingga setiap daerah mampu menyediakan pelayanan publik yang relatif setara. Namun, dalam praktiknya, perbedaan besaran dana alokasi umum yang diterima oleh masing-masing daerah serta perbedaan efektivitas pengelolaannya menyebabkan dampak dana alokasi umum terhadap pengurangan ketimpangan wilayah tidak selalu optimal.

Di samping dana alokasi umum, dana alokasi khusus diberikan untuk membiayai kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dana alokasi khusus diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di daerah tertinggal dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Akan tetapi, perbedaan alokasi dan pemanfaatan dana alokasi khusus antar daerah juga berpotensi memengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan wilayah, terutama apabila alokasi dana tersebut belum sepenuhnya tepat sasaran.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik wilayah yang beragam, baik dari sisi geografis, jumlah penduduk, maupun tingkat aktivitas ekonomi. Keberagaman tersebut menyebabkan adanya perbedaan tingkat pembangunan antar kabupaten/kota. Daerah perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi seperti Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang cenderung memiliki tingkat aktivitas ekonomi dan kontribusi terhadap perekonomian daerah yang lebih besar dibandingkan daerah dengan keterbatasan sumber daya dan akses pembangunan seperti Kabupaten Pakpak Barat maupun beberapa daerah kepulauan di wilayah Nias. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang tercermin dari perbedaan tingkat aktivitas ekonomi dan pembangunan antar daerah BPS (2024).

Ketimpangan wilayah tersebut dapat dianalisis secara kuantitatif menggunakan Indeks Williamson, yang mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah berdasarkan PDRB per kapita. Dengan menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan jumlah penduduk, indeks ini mampu memberikan gambaran tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi secara komprehensif. Indeks Williamson dipilih karena mampu mengukur ketimpangan regional dengan mempertimbangkan distribusi penduduk antar daerah.

**Tabel 1.1 Nilai PAD, DAU, DAK Dan Ketimpangan Wilayah di Sumatera Utara**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>	<b>DAU</b>	<b>DAK</b>	<b>Ketimpangan Wilayah</b>
2020	5.531,24	2.474,47	4.069,11	0,56
2021	6.402,71	2.463,69	4.260,68	0,55
2022	7.258,02	2.463,69	2.045,14	0,56
2023	6.723,94	2.683,05	2.291,81	0,57
2024	7.368,76	2.876,29	2.174,78	0,58

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara dan DJPK Kemenkan (2026)

Berdasarkan tabel 1.1, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi Sumatera Utara menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 PAD sebesar 5.531,24 kemudian meningkat menjadi 6.402,71 pada tahun 2021 dan kembali naik menjadi 7.258,02 pada tahun 2022. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 6.723,94, PAD kembali meningkat pada tahun 2024 hingga mencapai 7.368,76. Peningkatan PAD ini menunjukkan adanya pertumbuhan kemampuan fiskal daerah, namun peningkatan tersebut tidak serta-merta diikuti oleh penurunan ketimpangan wilayah.

Dana Alokasi Umum (DAU) selama periode analisis relatif stabil dengan kecenderungan meningkat secara bertahap. Pada tahun 2020 nilai DAU sebesar 2.474,47 kemudian sedikit menurun pada tahun 2021-2022 sebesar 2.463,69 dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 2.683,05 seta kembali naik pada tahun 2024 menjadi 2.876,29. Stabilitasnya DAU menunjukkan adanya upaya pemerintah pusat dalam menjaga pemerataan fiskal daerah, namun besarnya alokasi tersebut belum mampu menekan kesenjangan pembangunan secara signifikan.

Berbeda dengan PAD dan DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2020 nilai DAK sebesar 4.069,11 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 4.260,68 namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2022 menjadi 2.045,14. Pada tahun 2023 DAK kembali meningkat menjadi 2.291,81 kemudian sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 2.174,78. Perubahan alokasi ini menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan sektor prioritas belum berlangsung secara stabil setiap tahunnya.

Kondisi tersebut terlihat pada nilai indeks williamson yang digunakan untuk mengukur ketimpangan wilayah. Nilai indeks sebesar 0,56 pada tahun 2020, sedikit menurun menjadi 0,55 pada 2021, namun kembali meningkat menjadi 0,56 pada tahun 2022, naik menjadi 0,57 pada tahun 2023, dan mencapai 0,58 pada tahun 2024. Nilai indeks yang

berada di atas 0,50 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan wilayah tergolong tinggi. Peningkatan nilai indeks dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa pembangunan antar wilayah di Provinsi Sumatera Utara masih belum merata meskipun terjadi peningkatan PAD dan tranfer dari pemerintah.

Berdasarkan perkembangan nilai Indeks Williamson yang cenderung meningkat dari 0,56 pada tahun 2020 menjadi 0,58 pada tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara masih tergolong tinggi dan menunjukkan kecenderungan memburuk. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pendapatan asli daerah serta transfer fiskal berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Temuan empiris dalam penelitian Finuliyah and Khusaini (2022) yang menyimpulkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah belum secara signifikan mampu menurunkan ketimpangan antar wilayah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perbedaan struktur ekonomi dan efektivitas pemanfaatan anggaran antar daerah menyebabkan ketimpangan tetap terjadi. Selain itu dalam penelitian Nasution (2020) menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah, namun dampaknya terhadap pemerataan pembangunan sangat bergantung pada pengelolaan dan prioritas penggunaan anggaran di masing-masing daerah. Kedua penelitian tersebut memperkuat dugaan bahwa instrumen fiskal daerah memiliki keterkaitan dengan ketimpangan wilayah, tetapi belum memberikan hasil yang konsisten dalam menurunkan ketimpangan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sifat penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara.

Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk data panel (pooled data), yaitu kombinasi antara data time series dan cross section. Data cross section terdiri atas 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan data time series mencakup periode 2020–2024 sehingga diperoleh sebanyak 165 observasi.

Data penelitian diperoleh dari publikasi resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data PAD, DAU, dan DAK diperoleh dari DJPK, sedangkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah penduduk diperoleh dari BPS.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketimpangan wilayah yang diukur menggunakan Indeks Williamson berdasarkan data PDRB per kapita dan jumlah penduduk. Variabel independen terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan mengumpulkan dan mengolah data yang bersumber dari publikasi resmi pemerintah, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews. Model yang digunakan dipilih melalui pengujian model panel yang meliputi Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier untuk menentukan model terbaik antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Setelah model terbaik diperoleh, dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial variabel independen terhadap ketimpangan wilayah, uji F untuk mengetahui pengaruh simultan, serta koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Persamaan regresi data panel yang digunakan adalah:

$$KW_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \varepsilon_{it}$$

dengan:

- $KW_{it}$  = Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson);
- $PAD_{it}$  = Pendapatan Asli Daerah;
- $DAU_{it}$  = Dana Alokasi Umum;
- $DAK_{it}$  = Dana Alokasi Khusus;

- $\beta_0$  = konstanta;
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = koefisien regresi;
- $\varepsilon_{it}$  = error term.

Metode ini digunakan untuk menguji pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap ketimpangan wilayah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2024.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### Hasil

##### Analisis Deskriptif Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi resmi. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk diperoleh melalui publikasi resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, sedangkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diperoleh dari publikasi resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Data *cross section* terdiri dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, sementara data *time series* menggunakan periode tahun 2020–2024 sehingga total observasi dalam penelitian ini berjumlah 165 pengamatan. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-Views versi 13.

Berdasarkan data Indeks Williamson, tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2024 menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antar kabupaten/kota. Kota Medan tercatat sebagai daerah dengan tingkat ketimpangan tertinggi selama periode penelitian, dengan nilai Indeks Williamson sebesar 0,479309 pada tahun 2020 dan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi sebesar 0,471584 pada tahun 2024. Selain Kota Medan, Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga termasuk daerah yang memiliki tingkat ketimpangan relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya.

Di sisi lain, Kabupaten Serdang Bedagai merupakan daerah dengan tingkat ketimpangan terendah, dengan nilai Indeks Williamson sebesar 0,00191 pada tahun 2024. Tingkat ketimpangan yang relatif rendah juga terlihat pada Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi, dan Kabupaten Pakpak Bharat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa distribusi aktivitas ekonomi dan pembangunan di wilayah-wilayah tersebut cenderung lebih merata dibandingkan daerah lain di Provinsi Sumatera Utara.

Secara keseluruhan, nilai Indeks Williamson pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode penelitian berada pada kisaran 0,00191 hingga 0,479309. Rentang nilai yang cukup lebar tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah masih bervariasi. Perbedaan potensi ekonomi, konsentrasi kegiatan usaha, ketersediaan infrastruktur, serta kemampuan fiskal daerah diduga menjadi faktor yang memengaruhi perbedaan tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota. Gambaran statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Sebelum Transform**

	Y	X1	X2	X3
Mean	0.055742	10175.42	636.1755	22122.43
Median	0.034346	7993.000	556.7700	19831.00
Maximum	0.480893	98401.00	1927.310	68610.00
Minimum	0.001072	1042.000	318.5700	120.0000
Std. Dev.	0.081974	12292.61	301.7224	12918.83
Skewness	3.893211	5.259773	2.011008	1.161872
Kurtosis	19.55981	35.54220	6.984958	4.489967
Jarque-Bera	2302.132	8041.384	220.3884	52.38604
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	9.197361	1678945.	104968.9	3650201.
Sum Sq. Dev.	1.102048	2.48E+10	14929972	2.74E+10
Observations	165	165	165	165

Sumber: Hasil data diolah Eviews (2026)

Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui bahwa variabel Ketimpangan Wilayah (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,055742 dengan nilai terendah sebesar 0,001072 dan nilai tertinggi sebesar 0,480893. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 10.175,42, sedangkan Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Alokasi Khusus (X3) masing-masing memiliki nilai rata-rata sebesar 636,18 dan 22.122,43. Nilai standar deviasi pada setiap variabel menunjukkan adanya variasi data antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode penelitian. Selain itu, nilai skewness seluruh variabel menunjukkan angka positif dan nilai kurtosis berada di atas 3, yang mengindikasikan bahwa distribusi data cenderung tidak simetris dan tidak mengikuti distribusi normal. Kondisi tersebut diperkuat oleh nilai probabilitas Jarque-Bera yang lebih kecil dari 0,05 pada seluruh variabel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data sebelum transformasi belum memenuhi asumsi normalitas sehingga perlu dilakukan transformasi data sebelum tahap analisis lebih lanjut. Berikut adalah statistik deskriptif sesudah transformasi:

**Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Sesudah Transform**

	Y	X1	X2	X3
Mean	0.055742	4.527323	6.372981	5.267606
Median	0.034346	4.521680	6.322152	5.311480
Maximum	0.480893	7.960100	7.563881	6.531023
Minimum	0.001072	2.491551	5.763842	2.823163
Std. Dev.	0.081974	0.977660	0.382677	0.557011
Skewness	3.893211	0.926759	1.001142	-0.362711
Kurtosis	19.55981	5.331481	3.771771	4.252291
Jarque-Bera	2302.132	60.99043	31.65780	14.39948
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000747
Sum	9.197361	747.0083	1051.542	869.1550
Sum Sq. Dev.	1.102048	156.7543	24.01646	50.88277
Observations	165	165	165	165

Sumber: Hasil data diolah Eviews (2026)

1. Variabel ketimpangan wilayah (Y) memiliki nilai terendah sebesar 0,001072 dan nilai tertinggi sebesar 0,480893. Rata-rata nilai ketimpangan wilayah selama periode penelitian sebesar 0,055742 dengan standar deviasi sebesar 0,081974.
2. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma menunjukkan nilai minimum sebesar 2,491551 dan nilai maksimum sebesar 7,960100. Nilai rata-rata sebesar 4,527323 dengan standar deviasi sebesar 0,977660.
3. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah ditransformasikan memiliki nilai minimum sebesar 5,763842 dan nilai maksimum sebesar 7,563881. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 6,372981 dengan standar deviasi sebesar 0,382677.
4. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma memiliki nilai minimum sebesar 2,823163 dan nilai maksimum sebesar 6,531023. Nilai rata-rata sebesar 5,267606 dengan standar deviasi sebesar 0,557011.

Secara umum, nilai standar deviasi pada seluruh variabel penelitian berada di bawah nilai rata-ratanya (*mean*). Kondisi ini menunjukkan bahwa data memiliki tingkat penyebaran yang relatif rendah dan cenderung terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata, sehingga data dinilai cukup representatif untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

**Uji Pemilihan Regresi Data Panel**

Dilakukan uji untuk memilih *Common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model* untuk menentukan model terbaik serta paling tepat pada regresi data panel. Adapun uji tersebut adalah:

**Uji Chow**

Uji Chow merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model (CEM)* dan *Fixed Effect Model (FEM)* dalam analisis regresi data panel. Pengambilan keputusan pada uji ini dilakukan berdasarkan nilai probabilitas. Apabila nilai probabilitas (Prob.) lebih besar dari 0,05 maka model yang dipilih

adalah *Common Effect Model (CEM)*. Sebaliknya, apabila nilai *probabilitas (Prob.)* lebih kecil dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

**Tabel 4.3 Hasil Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests  
 Equation: Untitled  
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	539.193443	(32,129)	0.0000
Cross-section Chi-square	809.068678	32	0.0000

Sumber: Hasil data diolah Eviews (2026)

Berdasarkan hasil Uji Chow yang ditunjukkan pada Tabel 4.3, diperoleh nilai probabilitas (*Prob.*) *Cross-section F* sebesar 0,0000 dan *Cross-section Chi-square* sebesar 0,0000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian, model yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model (FEM)* dibandingkan *Common Effect Model (CEM)*.

### Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)* dalam regresi data panel. Dasar pengambilan keputusan pada uji ini dilihat dari nilai probabilitas (*Prob.*). Apabila nilai probabilitas  $< 0,05$  maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model (FEM)*, sedangkan apabila nilai probabilitas  $> 0,05$  maka model yang dipilih adalah *Random Effect Model (REM)*.

**Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
 Equation: Untitled  
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.636299	3	0.0219

Sumber: Hasil data diolah Eviews (2026)

Berdasarkan hasil Uji Hausman yang disajikan pada Tabel 4.4, diperoleh nilai probabilitas (*Prob.*) sebesar 0,0219. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen ( $0,0219 < 0,05$ ), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian, model yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model (FEM)* dibandingkan dengan *Random Effect Model (REM)*.

### Uji Langrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier (LM)* dilakukan untuk menentukan model regresi data panel yang paling tepat antara *Common Effect Model (CEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini dilihat dari nilai probabilitas Breusch-Pagan. Jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka model yang dipilih adalah *Random Effect Model (REM)*, sedangkan jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka model yang digunakan adalah *Common Effect Model (CEM)*.

**Tabel 4.5 Hasil Uji Langrange Multiplier**

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects  
 Null hypotheses: No effects  
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10278>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	308.7567 (0.0000)	1.672204 (0.1960)	310.4289 (0.0000)
Honda	17.57148 (0.0000)	-1.293137 (0.9020)	11.51052 (0.0000)
King-Wu	17.57148 (0.0000)	-1.293137 (0.9020)	4.637977 (0.0000)
Standardized Honda	18.51722 (0.0000)	-1.079127 (0.8597)	8.597924 (0.0000)
Standardized King-Wu	18.51722 (0.0000)	-1.079127 (0.8597)	2.381225 (0.0086)
Gourieroux, et al.	--	--	308.7567 (0.0000)

Sumber: Hasil data diolah Eviews (2026)

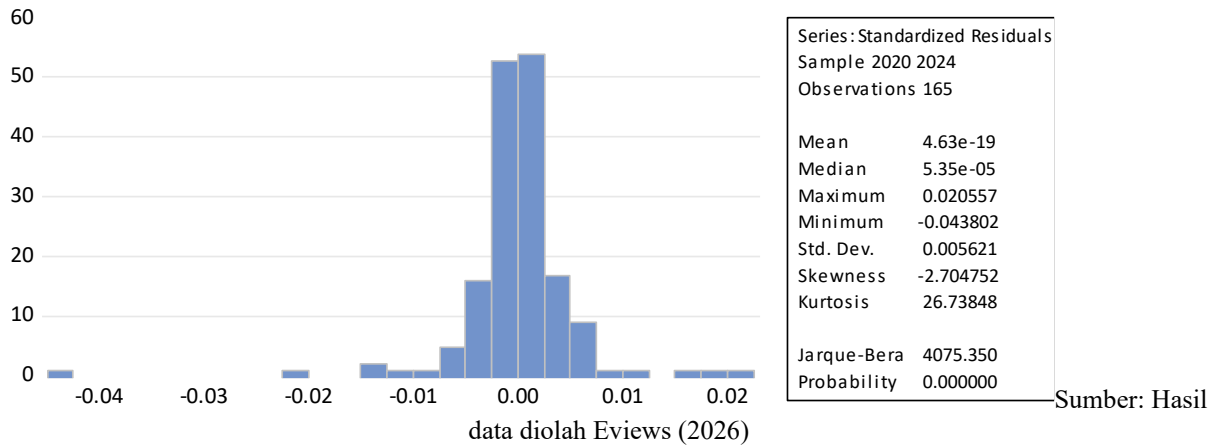
Berdasarkan hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) yang ditunjukkan pada Tabel 4.5, nilai probabilitas (*Prob.*) Breusch-Pagan Cross-section sebesar 0,0000 dan Breusch-Pagan Both sebesar 0,0000. Nilai probabilitas  $< 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa *Random Effect Model* (REM) lebih sesuai digunakan dibandingkan *Common Effect Model* (CEM).

Meskipun demikian, hasil Uji Hausman sebelumnya menunjukkan nilai probabilitas sebesar  $0,0219 < 0,05$ , sehingga model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Oleh karena itu, meskipun Uji Lagrange Multiplier mengarah pada pemilihan REM, model yang digunakan dalam penelitian ini tetap *Fixed Effect Model* (FEM) karena merupakan model yang paling tepat berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan.

**Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Normalitas**

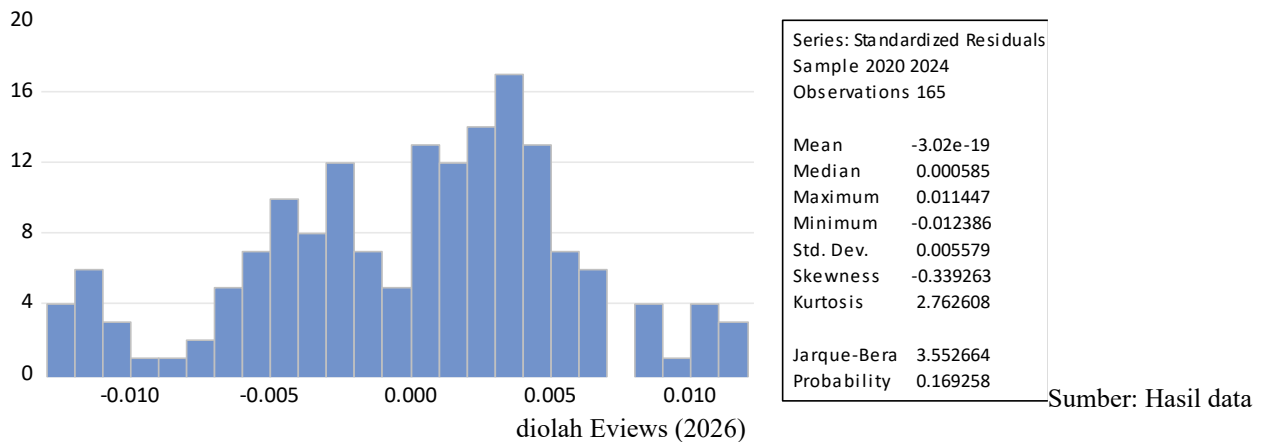
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki data berdistribusi normal atau mendekati normal. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini yaitu apabila nilai probabilitas Jarque-Bera (JB)  $> 0,05$  maka data dinyatakan terdistribusi normal. Adapun hasil uji normalitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Sebelum Transform**



Berdasarkan hasil pengujian normalitas sebelum dilakukan transformasi, diperoleh nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar  $0,000000 < 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa residual pada model penelitian belum memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, transformasi data dilakukan untuk memperbaiki distribusi residual agar lebih mendekati distribusi normal sehingga dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.

**Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Sesudah Transform**



Berdasarkan Gambar 4.2, hasil uji normalitas setelah dilakukan transformasi menunjukkan nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar  $0,169258 > 0,05$  sehingga  $H_0$  diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa residual model telah memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian, transformasi data yang dilakukan mampu memperbaiki distribusi residual sehingga model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

**Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai korelasi antar variabel bebas. Jika nilai koefisien korelasi  $> 0,80$  maka terjadi multikolinearitas, sedangkan apabila nilai koefisien korelasi antar variabel independen  $< 0,80$  maka model regresi tidak mengalami multikolinearitas Ghozali (2018;55),

**Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas Sebelum Transform**

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.402127	0.308217
X2	0.402127	1.000000	0.818867

X3	0.30821	0.818867	1.000000
----	---------	----------	----------

Sumber: Hasil data diolah Eviews (2026)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.6, diketahui bahwa nilai korelasi tertinggi antar variabel independen terdapat pada hubungan antara Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Alokasi Khusus (X3) sebesar 0,818867. Nilai tersebut melebihi batas yang ditetapkan, yaitu 0,80. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi sebelum dilakukan transformasi masih mengandung indikasi multikolinearitas.

**Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas Sesudah Transform**

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.707977	0.430788
X2	0.707977	1.000000	0.760584
X3	0.430788	0.760584	1.000000

Sumber: Hasil data diolah Eviews (2026)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.7, diketahui bahwa seluruh nilai korelasi antar variabel independen setelah dilakukan transformasi berada di bawah 0,80. Nilai korelasi tertinggi terdapat pada hubungan antara variabel X2 dan X3 sebesar 0,760584. Karena seluruh nilai korelasi antar variabel independen menunjukkan nilai < 0,80, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi setelah transformasi tidak mengalami gejala multikolinearitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi asumsi multikolinearitas, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis pada tahap selanjutnya.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah varians residual dalam model regresi bersifat konstan atau tidak. Jika nilai probabilitas pada masing-masing variabel independen > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

**Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas Sebelum Transform**

Heteroskedasticity Test: Glejser  
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	14.90432	Prob. F(3,161)	0.0000
Obs*R-squared	35.86375	Prob. Chi-Square(3)	0.0000
Scaled explained SS	29.80865	Prob. Chi-Square(3)	0.0000

Sumber: Hasil data diolah Eviews (2026)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser yang disajikan pada Tabel 4.8, diperoleh nilai Prob. F-statistic sebesar 0,0000 dan nilai Prob. Chi-Square sebesar 0,0000 < 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi sebelum dilakukan transformasi data masih mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, diperlukan transformasi data untuk memperbaiki model dan mengurangi masalah heteroskedastisitas yang terjadi.

**Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas Sesudah Transform**

Heteroskedasticity Test: Glejser  
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	2.218607	Prob. F(3,161)	0.0880
Obs*R-squared	6.550387	Prob. Chi-Square(3)	0.0877
Scaled explained SS	5.920741	Prob. Chi-Square(3)	0.1155

Sumber: Hasil data diolah Eviews (2026)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser setelah dilakukan transformasi data sebagaimana disajikan pada Tabel 4.9, diperoleh nilai Prob. F-statistic sebesar 0,0880, nilai Prob. Chi-Square (Obs\*R-squared) sebesar 0,0877, dan nilai Prob. Chi-Square (Scaled Explained SS) sebesar 0,1155 > 0,05.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa model regresi setelah transformasi data tidak lagi mengalami gejala heteroskedastisitas. Hasil ini menunjukkan bahwa varians residual telah bersifat homogen atau konstan pada setiap pengamatan, sehingga asumsi homoskedastisitas dalam model regresi telah terpenuhi dan model dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

#### **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan metode Durbin-Watson (DW test). Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini yaitu apabila nilai Durbin-Watson berada di antara -2 sampai 2 maka model regresi tidak mengalami autokorelasi. Berikut merupakan hasil uji autokorelasi pada penelitian ini:

**Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi Sebelum Transformasi**

Mean dependent var	0.055742
S.D. dependent var	0.081974
Akaike info criterion	-7.094348
Schwarz criterion	-6.416687
Hannan-Quinn criter.	-6.819262
Durbin-Watson stat	1.983187

Sumber: Hasil data diolah Eviews (2026)

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada Tabel 4.10 sebelum transformasi, nilai Durbin-Watson yang diperoleh sebesar 1,983187. Nilai tersebut masih berada dalam rentang kriteria pengujian yang digunakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan adanya gejala autokorelasi.

**Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi Sesudah Transformasi**

Mean dependent var	0.055742
S.D. dependent var	0.081974
Akaike info criterion	-6.990087
Schwarz criterion	-6.312426
Hannan-Quinn criter.	-6.715000
Durbin-Watson stat	1.617908

Sumber: Hasil data diolah Eviews (2026)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada Tabel 4.11 setelah dilakukan transformasi, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,617908. Nilai tersebut masih berada dalam rentang kriteria pengujian yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi. Dengan demikian, residual dalam model tetap tidak menunjukkan adanya korelasi antar periode pengamatan setelah transformasi dilakukan.

#### **Analisis Regresi Data Panel**

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model regresi data panel melalui *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) serta pengujian Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier, maka model yang terpilih dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Dengan demikian, persamaan regresi linear data panel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) sebagai berikut:

**Tabel 4.12 Hasil Fixed Effect Model (FEM)**

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10278>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.056771	0.071559	-0.793349	0.4290
X1	0.000680	0.002964	0.229287	0.8190
X2	0.015065	0.012661	1.189856	0.2363
X3	0.002549	0.002121	1.201967	0.2316

Sumber: Hasil data diolah Eviews (2026)

Berdasarkan hasil estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) pada Tabel 4.12, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,056771 + 0,000680 X1 + 0,015065X2 + 0,002549 X3 + e$$

1. Nilai konstanta sebesar - 0,056771 mengindikasikan bahwa ketika seluruh variabel independen diasumsikan bernilai nol atau tidak mengalami perubahan, maka nilai variabel dependen yaitu ketimpangan wilayah berada pada angka - 0,056771.
2. Pendapatan Asli Daerah memiliki koefisien sebesar 0,000680, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada X1 akan meningkatkan ketimpangan wilayah sebesar 0,000680, dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Dana Alokasi Umum dengan koefisien sebesar 0,015065 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada X2 akan meningkatkan ketimpangan wilayah sebesar 0,015065, dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Dana Alokasi Khusus memiliki koefisien sebesar 0,002549, yang berarti setiap kenaikan satu satuan pada X3 akan berdampak meningkatkan ketimpangan wilayah sebesar 0,002549, dengan asumsi variabel lain tetap.

### Uji Hipotesis

#### Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian uji t pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistic dan nilai probabilitas pada tingkat signifikansi sebesar 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Adapun hasil uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.056771	0.071559	-0.793349	0.4290
X1	0.000680	0.002964	0.229287	0.8190
X2	0.015065	0.012661	1.189856	0.2363
X3	0.002549	0.002121	1.201967	0.2316

Sumber: Hasil data diolah Eviews (2026)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.13, dapat dijelaskan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah (X1)  
Memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $0,229287 < t_{tabel}$  sebesar 1,97481. Nilai probabilitas sebesar  $0,8190 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima,  $H_1$  ditolak. Dengan demikian, secara parsial pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah.
2. Dana Alokasi Umum (X2)  
Dana Alokasi Umum (X2) memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $1,189856 < t_{tabel}$  1,97481. Nilai probabilitas sebesar  $0,2363 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima,  $H_1$  ditolak. Dengan demikian, secara parsial dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah.
3. Dana Alokasi Khusus (X3)

Dana Alokasi Khusus (X3) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $1,201967 < t_{tabel}$  1,97481. Nilai probabilitas sebesar  $0,2316 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima,  $H_1$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah.

Secara keseluruhan, hasil uji parsial menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai  $t_{hitung}$  yang lebih rendah dibandingkan nilai  $t_{tabel}$  serta nilai probabilitas yang melebihi tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ketimpangan wilayah.

### Uji Simultan (Uji-F)

Uji simultan atau uji F merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5%. Adapun hasil uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.14 Hasil Uji Simultan (Uji-F)**

R-squared	0.994782
Adjusted R-squared	0.993366
S.E. of regression	0.006677
Sum squared resid	0.005751
Log likelihood	612.6821
F-statistic	702.5974
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil data diolah Eviews (2026)

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) yang disajikan pada Tabel 4.14, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  702,5974 > nilai  $F_{tabel}$  2,66 maka  $H_2$  diterima,  $H_0$  ditolak. Hasil tersebut juga didukung oleh nilai probabilitas sebesar  $0,0000 < signifikansi$  0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Sumatera Utara.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai koefisien determinasi menggambarkan seberapa besar persentase variasi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen melalui model regresi yang diperoleh. Berikut merupakan hasil dari koefisien determinasi ( $R^2$ ):

**Tabel 4.15 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

R-squared	0.994782
Adjusted R-squared	0.993366
S.E. of regression	0.006677
Sum squared resid	0.005751
Log likelihood	612.6821
F-statistic	702.5974
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil data diolah Eviews (2026)

Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada Tabel 4.15, diperoleh nilai R-squared sebesar 0.994782 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen mencapai 99,48%, sedangkan sisanya sebesar 0,53% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Selain itu, nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.993366 menunjukkan bahwa setelah penyesuaian terhadap jumlah variabel dan sampel, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen tetap sangat tinggi, yaitu sebesar 99,33%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki daya jelaskan yang sangat kuat terhadap variabel dependen, sehingga model dinilai sangat baik dan layak digunakan dalam analisis penelitian.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera Utara**

Berdasarkan hasil estimasi regresi, pendapatan asli daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.000680, yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera Utara. Selanjutnya, hasil uji parsial menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $0,229287 < t_{tabel} 2,04227$  serta nilai probabilitas sebesar  $0,8190 > 0,05$ . Oleh karena itu, secara parsial pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera Utara.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa perubahan pendapatan asli daerah belum mampu menjelaskan variasi ketimpangan wilayah secara signifikan. Dengan kata lain, peningkatan maupun penurunan pendapatan asli daerah belum memberikan dampak nyata terhadap perubahan tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota. Secara teoritis, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah, yaitu semakin tinggi PAD maka ketimpangan seharusnya semakin menurun karena daerah memiliki kemandirian fiskal yang lebih baik dalam membiayai pembangunan dan pemerataan layanan publik. Namun, dalam penelitian ini arah pengaruh berdasarkan koefisien menunjukkan hasil yang berbeda, dan pengaruh tersebut juga tidak signifikan secara statistik.

Tidak signifikannya pengaruh PAD dapat disebabkan oleh masih rendahnya efektivitas penggunaan PAD yang cenderung lebih banyak dialokasikan pada belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan yang bersifat produktif dalam mengurangi ketimpangan. Selain itu, perbedaan struktur ekonomi antarwilayah juga menyebabkan peningkatan PAD tidak secara langsung berdampak pada pemerataan pembangunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Finuliyah and Khusaini (2022) yang menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah, karena ketimpangan lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan belanja infrastruktur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera Utara meskipun secara teoritis seharusnya berpengaruh negatif.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera Utara**

Berdasarkan hasil estimasi regresi, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $1,189856 < t_{tabel} 2,04227$  dengan nilai probabilitas sebesar  $0,2363 > 0,05$ . Dengan demikian, secara parsial DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera Utara.

Secara teoritis, Dana Alokasi Umum (DAU) diharapkan memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah karena merupakan instrumen pemerataan fiskal yang bertujuan mengurangi disparitas kemampuan keuangan antar pemerintah daerah. Melalui transfer dana dari pemerintah pusat, daerah dengan keterbatasan pendapatan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan, sehingga diharapkan semakin besar DAU yang diterima, terutama oleh daerah berpendapatan rendah, maka ketimpangan wilayah dapat berkurang.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, penggunaan DAU di banyak daerah masih didominasi untuk membiayai belanja rutin atau operasional pemerintah daerah, sehingga belum optimal dalam mendukung pengurangan ketimpangan wilayah. Kondisi ini membuat DAU belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen pemerataan pembangunan. Kedua, perbedaan kapasitas pengelolaan anggaran antar daerah turut membatasi efektivitas DAU dalam mendorong pemerataan pembangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nasution (2020) yang menyatakan bahwa dana transfer pemerintah, termasuk DAU, tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah karena karena dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah dan kebijakan belanja masing-masing pemerintah daerah. Dengan demikian, secara parsial DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara, meskipun secara teori diharapkan memiliki pengaruh negatif.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera Utara**

Berdasarkan hasil estimasi regresi, variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai koefisien sebesar 0.002549, yang menunjukkan bahwa DAK memiliki arah pengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera Utara. Selanjutnya, hasil uji parsial menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $1,201967 < t_{tabel} 2,04227$  dengan nilai probabilitas sebesar  $0,2316 > 0,05$ . Dengan demikian, secara parsial DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera Utara.

Secara teoritis, DAK diharapkan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah karena dialokasikan untuk sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah tertinggal serta mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang telah diarahkan pada sektor tertentu membuat pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengalokasikannya secara langsung untuk menekan ketimpangan wilayah, sehingga fleksibilitas penggunaannya dalam menjawab prioritas daerah menjadi terbatas.

Kedua, efektivitas DAK sangat bergantung pada kemampuan masing-masing daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program yang didanai. Perbedaan kapasitas kelembagaan antar daerah menyebabkan dampak pembangunan yang dihasilkan tidak merata. Selain itu, masih terdapat kendala seperti keterlambatan penyaluran dana serta rendahnya penyerapan anggaran di beberapa daerah, sehingga peran DAK dalam mengurangi ketimpangan wilayah belum berjalan secara optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sidik, Hidayat, and Ridwansyah, (2020) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan antar daerah karena efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi kebijakan di tingkat daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara, meskipun secara teoritis diharapkan memiliki pengaruh negatif.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Namun, secara parsial masing-masing variabel, yaitu PAD, DAU, dan DAK, tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan wilayah di Sumatera Utara tidak ditentukan oleh satu sumber pendanaan saja, melainkan oleh kombinasi berbagai faktor fiskal dan pembangunan daerah. Selain itu, model penelitian mampu menjelaskan variasi ketimpangan wilayah sebesar 99,40%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad, Abdul Chalid, Dkk. 2024. "Fiscal Transfer Redistribution And Regional Inequality Between Island And Non-Island Provinces In Indonesia." *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IJISE)* 7 (2): 2523–2559.
- BPS, Badan Pusat Statistik. 2024. *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka*. Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Capello, Roberta. 2016. *Regional Economics*. 2nd Edition. London: Routledge.
- DJPK, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2024. *Data Dana Transfer Ke Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Finuliyah, Firdaus, And Moh Khusaini. 2022. "Pendapatan Asli Daerah, Belanja Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Wilayah." *Journal Of Development Economic And Social Studies* 1 (1): 18–28.
- Firdaus, Muhammad. 2019. *Ekonometrika: Suatu Pendekatan Aplikatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Ke-8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, And Muhammad Syam Kusufi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ke-2. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2019. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2018a. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2018b. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nasution, Marihot. 2020. "Ketimpangan Antar Wilayah Dan Hubungannya Dengan Belanja Pemerintah: Studi Di Indonesia." *Jurnal Budget* 5 (2): 84–102.
- Nordiawan, Deddi, And Ayuningtyas Hertianti. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
- Paulina, And Susi Adiauwaty. 2025. "Fiscal Transfers And The Persistence Of Regional Inequality: A Critical Review Of Indonesia's Intergovernmental Funding System." *Moneta: Journal Of Economics And Finance* 3 (4): 283–296.
- Santoso, Singgih. 2012. *Analisis SPSS Pada Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo (Gramedia Group).
- Sidik, Muhamad, Dkk. 2020. "Dampak Alokasi Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) Terhadap Tingkat Ketimpangan Antar Daerah Di Provinsi Jambi Periode 2010–2019." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 15 (2): 229–238.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjafrizal. 2018. *Ekonomi Regional: Teori Dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edisi Ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Suwarjana, Ketut. 2022. *Populasi Dan Sampel, Teknik Sampling & Bias Dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Todaro, Michael P., And Stephen C. Smith. 2020. *Economic Development*. Boston: Pearson Education.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulfikar, And Najmi. 2023. *Ekonometrika Terapan: Analisis Data Panel Dengan Eviews Dan Stata*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- <https://sumut.bps.go.id/>